



# PERAN SEKTOR KEUANGAN

TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

**Editor:**

**Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU**

Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  
dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR)

Editor:

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU

Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  
dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR)

# **PERAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA**



Diterbitkan oleh:  
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika  
2015



**Judul:**

Peran Sektor Keuangan terhadap Perekonomian Indonesia

**Perpustakaan Nasional:**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xii+161 hlm.; 15.5x23 cm

ISBN: 978-602-1247-39-6

Cetakan Pertama, 2015

**Penulis:**

Rasbin, STP, M.SE.

Ari Mulianta Ginting, S.E., M.SE.

Ariesy Tri Mauleny, S.Si, M.E.

Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Lisnawati, S.Si., M.SE.

Venty Eka Satya, S.E., MSi.

**Editor:**

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU

**Penyelia Aksara:**

Helmi Yusuf

**Desain Sampul:**

Abue

**Tata Letak:**

Zaki

**Diterbitkan oleh:**

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Bersama:**

**Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012**

**Kantor Pusat:**

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

**Perwakilan Jabodetabek:**

Perum Wisnamas Blok E1 No. 43-44, Cinangka, Sawangan, Kota Depok

Telp. (021) 7417244

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72****Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**KATA PENGANTAR**  
**Kepala Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan**  
**Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI**

Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penerbitan buku bunga rampai dengan judul **“Peran Sektor Keuangan Terhadap Perekonomian Indonesia”** yang disusun oleh peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil analisis berupa gagasan dan pemikiran serta pengalaman empiris yang dituangkan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan dalam penyempurnaan kebijakan sektor keuangan, khususnya dalam menopang perekonomian Indonesia. Pendekatan analisis dilakukan tidak hanya berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan namun juga berdasarkan *review* berbagai kajian terkait serta analisis empiris berdasarkan studi-studi sebelumnya.

Struktur buku terdiri atas 6 (enam) bagian tulisan yang memiliki keterkaitan yang baik untuk memperkaya pembahasan mengenai perkembangan sektor keuangan di Indonesia dari berbagai perspektif. Saya sampaikan apresiasi kepada masing-masing penulis yang terdiri dari Rasbin, Ari Mulianta Ginting, Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, Lisnawati dan Venty Eka Satya untuk tulisannya yang beragam warna mengenai sektor keuangan di Indonesia, baik itu sektor swasta maupun pemerintahan.

Selain itu, saya sampaikan juga apresiasi dan terima kasih kepada Prof. (Riset) Carunia Mulya Firdausy, Ph.D. yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya sebagai editor buku ini. Kepada penerbit disampaikan penghargaan atas kerja samanya dalam penerbitan bersama dengan P3DI, Setjen DPR-RI. Besar harapan saya, buku ini akan bermanfaat, bukan saja dalam perumusan Rancangan Undang-



Undang khususnya namun juga dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Jakarta, Oktober 2015  
Kepala Pusat Pengkajian,  
Pengelolaan Data dan Informasi,  
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Rahaju Setya Wardani  
NIP. 19600419 198803 2 001

## PROLOG

Pengaruh perkembangan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi sudah lama menjadi isu yang kontroversi di berbagai kalangan ekonom. Perdebatan tersebut berpusat pada pertanyaan apakah perkembangan sektor keuangan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya. Beberapa ekonom sepakat dan percaya bahwa perkembangan sektor keuangan merupakan salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, sektor keuangan secara umum digerakkan oleh dua lembaga yaitu lembaga perbankan yang terdiri dari bank-bank umum dan lembaga non perbankan yang terdiri dari pasar modal, lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun dan pengadaian. Perkembangan sektor keuangan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti perkembangan sektor riil, regulasi pemerintah di bidang ekonomi, perkembangan sosial masyarakat, politik dan demokrasi serta dunia internasional.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan optimal apabila stabilitas sistem keuangan negara tersebut dapat terpelihara dengan baik. Khusus untuk Indonesia, sektor keuangan masih didominasi oleh perbankan. Akibatnya, segala sumber pembiayaan pembangunan dan perekonomian tergantung dari perbankan. Sementara sektor keuangan lainnya relatif kurang berkembang.

Buku yang berjudul **“Peran Sektor Keuangan Terhadap Perekonomian Indonesia”** ini salah satunya ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan yang mendukung perekonomian Indonesia. Disamping itu buku ini juga mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perkembangan sektor perekonomian masa kini dan dampaknya terhadap perekonomian di masa yang akan datang.

Buku ini terdiri dari 6 Bab. Bab pertama mengungkap tentang perkembangan *early warning system* keuangan di Indonesia. Dalam bab ini diberikan antara lain tinjauan teori dan empiris mengenai model-model parametrik yang telah ada dalam melihat krisis perekonomian. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dampak pertumbuhan kredit sektor perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi pada bab 2.

Bab 3 mendiskusikan kebijakan penyertaan modal negara pada BUMN untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional. Dilanjutkan dengan pembahasan peran perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan sektor riil di bab 4.

Dua bab lainnya membahas mengenai sistem keuangan pusat dan daerah dalam memperkuat perekonomian nasional (Bab 5) dan perkembangan perubahan akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Bab 6). Untuk merangkum analisis dan pembahasan dari seluruh bab tersebut diberikan epilog pada bagian akhir buku ini.

Editor memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan selamat kepada Tim Penulis Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI atas terbitnya buku ini.

Editor meyakini kajian dalam buku ini dapat memberikan inspirasi dan masukan penting bagi para pengambil kebijakan, terutama pihak legislatif. Buku ini juga diyakini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca yang ingin mendalami pengetahuan tentang peranan sektor keuangan di Indonesia. Selamat Membaca.

Jakarta, Oktober 2015

Editor

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR KEPALA P3DI</b> .....	iii
<b>PROLOG</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xii
<b>TULISAN PERTAMA</b>	
<b><i>EARLY WARNING SYSTEM</i> KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA: TINJAUAN TEORI DAN EMPIRIS MODEL-MODEL PARAMETRIK</b>	
<i>oleh: Rasbin</i> .....	1
I.    Pendahuluan .....	2
II.   Tataran Konsep tentang Model <i>Early Warning System</i> .....	7
III.  Model EWS dan Indikator-Indikatornya.....	11
IV.  Penutup .....	22
Daftar Pustaka .....	25
<b>TULISAN KEDUA</b>	
<b>PENGARUH PERKEMBANGAN KREDIT PERBANKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA</b>	
<i>oleh: Ari Mulianta Ginting</i> .....	27
I.    Pendahuluan .....	28
II.   Tataran Konsep Peran Sektor Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	30
III.  Perkembangan Kredit yang Disalurkan oleh Perbankan di Indonesia.....	34
IV.  Pengaruh Perkembangan Kredit yang Disalurkan oleh Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	38

V. Penutup .....	43
Daftar Pustaka.....	45
<b>TULISAN KETIGA</b>	
<b>KEBIJAKAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA</b>	
<b>BUMN DALAM MENINGKATKAN KINERJA</b>	
<b>PEREKONOMIAN NASIONAL</b>	
<i>oleh: Ariesy Tri Mauleny</i> .....	47
I. Pendahuluan .....	48
II. BUMN dan Kinerja Perekonomian.....	51
III. Kebijakan Penyertaan Modal Negara .....	59
IV. Perkembangan, Permasalahan dan	
Upaya Penyelesaian Penyertaan Modal Negara	
untuk BUMN .....	64
V. Penutup .....	74
Daftar Pustaka.....	76
<b>TULISAN KEEMPAT</b>	
<b>PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM</b>	
<b>MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR RIIL</b>	
<i>oleh: Nidya Waras Sayekti</i> .....	79
I. Pendahuluan .....	80
II. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia .....	81
III. Produk Perbankan Syariah .....	84
IV. Ekonomi Sektor Riil .....	86
V. Kinerja Perbankan Syariah dalam	
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil.....	88
VI. Kendala dan Masalah yang Dihadapi	
Perbankan Syariah.....	92
VII. Penutup .....	97
Daftar Pustaka.....	98
<b>TULISAN KELIMA</b>	
<b>IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN PUSAT DAN</b>	
<b>DAERAH DALAM MEMPERKUAT PEREKONOMIAN NASIONAL</b>	
<i>oleh: Lisnawati</i> .....	101
I. Pendahuluan .....	102
II. Sistem Keuangan Pusat-Daerah.....	104
III. Indikator Keberhasilan Implementasi	
Otonomi Daerah.....	108



IV. Penutup .....	116
Daftar Pustaka .....	117
<b>TULISAN KEENAM</b>	
<b>PERUBAHAN MENUJU AKUNTANSI</b>	
<b>PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL UNTUK</b>	
<b>MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN</b>	
<b>KEUANGAN NEGARA</b>	
<i>oleh: Venty Eka Satya</i> .....	119
I. Pendahuluan .....	120
II. Akuntansi Pemerintah dan Perkembangannya .....	123
III. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara .....	131
IV. Penutup .....	137
Daftar Pustaka .....	139
<b>EPILOG</b> .....	143
<b>INDEKS</b> .....	149
<b>BIOGRAFI EDITOR</b> .....	156
<b>BIOGRAFI PENULIS</b> .....	158

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b>	Sepuluh Gejolak Finansial Besar di Dunia .....	2
<b>Tabel 1.</b>	Uji Kausalitas <i>Granger</i> .....	38
<b>Tabel 2.</b>	Hasil Estimasi – VAR .....	39
<b>Tabel 1.</b>	Perkembangan Kebijakan mengenai BUMN.....	54
<b>Tabel 2.</b>	Perkembangan Jumlah BUMN dan Kepemilikan Minoritas BUMN .....	56
<b>Tabel 3.</b>	Perkembangan Kinerja BUMN .....	56
<b>Tabel 4.</b>	Peran BUMN terhadap APBN .....	57
<b>Tabel 5.</b>	Daftar 20 BUMN dengan Laba Terbesar Tahun 2013 dan 2014 .....	57
<b>Tabel 6.</b>	BUMN yang Merugi Tahun 2013 dan 2014.....	58
<b>Tabel 7.</b>	Perkembangan Dana Investasi Pemerintah Tahun 2010-2015.....	61
<b>Tabel 8.</b>	Perkembangan Pendapatan Negara, 2010-2015.....	63
<b>Tabel 9.</b>	Perkembangan PMN pada BUMN Tahun 2010-2015.....	64
<b>Tabel 10.</b>	PMN pada BUMN Menurut Program Prioritas.....	68
<b>Tabel 1.</b>	Perkembangan Kinerja Perbankan Syariah .....	89
<b>Tabel 2.</b>	Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi .....	91
<b>Tabel 1.</b>	Peta Kapasitas Fiskal Provinsi .....	110
<b>Tabel 2.</b>	Data Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi Tahun 1996-2013.....	112
<b>Tabel 1.</b>	<i>Accrual Accounting and Budgeting In The Public Sector</i> .....	127

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Kerangka Pikir .....	31
<b>Gambar 2.</b> Respon Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Kredit, Pertumbuhan Investasi, Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi .....	43
<b>Gambar 1.</b> Landasan Hukum Pengelolaan dan Operasional Pembinaan BUMN .....	52

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1.</b> Pertumbuhan Ekspor Periode 1981 - 2013.....	16
<b>Grafik 2.</b> Posisi Cadangan Devisa Indonesia Tahun 2001 - 2015 .....	17
<b>Grafik 3.</b> Rasio Konsumsi Pemerintah terhadap PDB .....	18
<b>Grafik 4.</b> Rasio Utang Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa.....	19
<b>Grafik 5.</b> Rasio M2 terhadap Cadangan Devisa Periode 2001 – 2014.....	20
<b>Grafik 6.</b> Perkembangan Defisit Fiskal Indonesia Periode 2001 – 2013.....	21
<b>Grafik 7.</b> Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Periode 2005 - 2015.....	22
<b>Grafik 1.</b> Perkembangan Pertumbuhan Kredit dan Ekonomi Periode Tahun 2005-2014.....	35
<b>Grafik 2.</b> Perkembangan Realisasi Kredit yang Disalurkan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2014.....	36
<b>Grafik 3.</b> Perkembangan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2014.....	37
<b>Grafik 1.</b> Indeks Ketimpangan Tahun 2003 Sebelum UU Otonomi Daerah .....	115
<b>Grafik 2.</b> Indeks Ketimpangan Tahun 2012 Setelah UU Otonomi Daerah .....	115

## EPILOG

Sektor keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu Negara sebagai penyedia dana utama bagi pembiayaan perekonomian. Sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika kapasitas perekonomian mengalami peningkatan dibanding dengan periode sebelumnya. Sementara peningkatan kapasitas ekonomi terjadi jika terdapat investasi baru ke dalam perekonomian..

Hampir semua negara berupaya mendorong perkembangan sektor keuangan untuk meningkatkan perekonomian sehingga mampu tumbuh lebih tinggi. Pengembangan sistem keuangan di Indonesia lebih dekat kepada tipe *bank-based system* dimana perbankan mendominasi sektor keuangan. Pilihan *bank based* diambil karena dirasakan lebih dekat dengan sektor industri sehingga lebih mudah memperoleh informasi. *Bank based* lebih mudah mengidentifikasi sektor usaha dan perusahaan yang prospektif sehingga investasi lebih optimal. Sementara *market based*, dapat mengurangi *inheren inefisiensi* yang ada dalam *bank-based system* dan terdapat peluang *risk sharing* dan *risk management* sehingga dapat meminimalisasi dampak dari *shock* dalam perekonomian.

Di Indonesia, sektor keuangan digerakkan oleh dua sektor keuangan yaitu lembaga perbankan yang terdiri dari bank-bank umum dan lembaga non perbankan yang terdiri dari pasar modal, lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun dan pengadaian. Perkembangan sektor keuangan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti perkembangan sektor riil, regulasi pemerintah di bidang ekonomi, perkembangan sosial masyarakat, politik dan demokrasi serta dunia internasional.

Kehadiran buku dengan tema **“Peran Sektor Keuangan Terhadap Perekonomian Indonesia”** telah memberikan



sumbangan pemikiran dan masukan kepada pembuat kebijakan dalam memecahkan permasalahan perekonomian Indonesia bidang keuangan, ekonomi dan kebijakan publik. Diawali dengan pembahasan mengenai upaya mengatasi krisis ekonomi agar tidak berdampak serius terhadap perekonomian nasional. Bagian buku ini menawarkan suatu alat deteksi sebagai *early warning system* (EWS). Dalam model-model EWS parametrik banyak digunakan indikator-indikator makroekonomi untuk menerangkan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi seperti nilai tukar riil, pertumbuhan ekspor dan impor, rasio cadangan devisa terhadap impor, rasio M2 terhadap cadangan devisa, proporsi investasi dalam GDP, pertumbuhan cadangan devisa dan sebagainya.

Berdasarkan pergerakan dari indikator-indikator makroekonomi tersebut, probabilitas Indonesia kembali mengalami krisis ekonomi seperti krisis ekonomi 1998 adalah rendah sehingga perekonomian ke depan diproyeksikan cukup stabil. Namun demikian terdapat beberapa indikator makroekonomi yang menunjukkan tren tidak bagus seperti rasio M2 terhadap cadangan devisa, defisit fiskal dan nilai tukar sehingga menimbulkan dugaan Indonesia akan mengalami krisis ekonomi seperti tahun 1998. Hal ini mendorong kewaspadaan para pelaku pasar sehingga sektor keuangan dapat terus berperan baik dalam perekonomian. Hal ini ditunjukkan dalam bagian pertama tulisan ini.

Peran sektor keuangan juga ditunjukkan oleh peran kredit perbankan dalam perekonomian. Perkembangan penyaluran kredit perbankan sebagai bagian dari sektor keuangan di Indonesia berfluktuasi dari tahun 2005-2014. Pada periode 2005 sampai dengan 2010, penyaluran kredit perbankan mengalami fluktuasi naik sementara setelah periode tersebut hingga tahun 2014 mengalami tren yang menurun.

Hasil analisa kuantitatif menemukan bahwa pertumbuhan kredit yang diberikan oleh sektor perbankan terbukti memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu ditengah situasi pertumbuhan kredit yang sedang menurun saat ini, maka sudah waktunya bagi Pemerintah beserta DPR untuk duduk bersama bersama *stakeholder* terkait untuk mencari solusi akan hal tersebut. Jika pertumbuhan kredit terus mengalami tren yang menurun akan berdampak negatif

terhadap perekonomian nasional diperlihatkan dalam tulisan pada bagian kedua buku ini.

Peningkatan kemandirian bangsa dalam mengupayakan sumber-sumber penerimaan negara dari dalam negeri harus terus dilakukan. Upaya memperkuat ketahanan fiskal untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan bagian negara dari laba BUMN, dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Penyertaan Modal Negara menjadi kebijakan sektor keuangan yang diharapkan dapat memberikan imbal jasa bagi Negara. Pemberian PMN kepada BUMN harus dapat merestrukturisasi BUMN dan mendukung program prioritas sehingga memiliki kemampuan dalam menghadapi dinamika global dan nasional serta menjamin peningkatan nilai dividen bagi penerimaan Negara. Dengan demikian PMN bagi BUMN menjadi bagian dari upaya membangun fundamental ekonomi yang kokoh dan bukan sekedar membagi jatah kekuasaan bagi pemerintahan yang sedang berjalan merupakan bagian tulisan ketiga yang diangkat dalam buku ini.

Bagian buku keempat mengangkat peran sektor perbankan syariah dalam perekonomian nasional khususnya sektor riil. Karena sudah hampir tiga dekade industri keuangan syariah hadir di Indonesia dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi. Sistem keuangan syariah telah teruji mampu bertahan dari beberapa krisis yang melanda ekonomi dunia, karena berlandaskan kepada pencapaian keadilan yang berbasis kepada transaksi riil dan distribusi kesejahteraan ekonomi maupun *ethical value* yang bersifat universal.

Dalam rangka berperan aktif mendukung pertumbuhan ekonomi sektor riil, perbankan syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp204,334 miliar pada akhir 2014. Komposisi penggunaan pembiayaan tersebut masih didominasi untuk konsumtif dan modal kerja, dengan pangsa terbesar sektor jasa dunia usaha. Beberapa masalah dan kendala dihadapi industri perbankan syariah dalam pelaksanaan kegiatannya, antara lain dana syariah lebih mahal dari konvensional karena berasal dari deposito, keterbatasan modal, dan belum adanya *reference rate* bagi bank syariah. Oleh karena itu, diperlukan peran dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia sehingga

mampu bersaing dengan perbankan konvensional dan perbankan syariah negara lain yang kemungkinan akan masuk ke Indonesia dalam rangka pasar global.

Selanjutnya pada bagian kelima dari buku ini mencoba mengemukakan sistem keuangan pusat dan daerah dalam memperkuat perekonomian nasional. Diungkapkan bahwa ketimpangan fiskal vertikal kabupaten/kota yang terjadi sebelum otonomi daerah sangat tinggi, namun pada awal pelaksanaan otonomi daerah, ketimpangannya semakin tinggi bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian berangsur-angsur tiap tahunnya ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat menurun walaupun masih jauh dari mandiri dilihat dari besarnya proporsi transfer dana pusat terhadap total penerimaan pemerintah daerah.

Ketimpangan fiskal vertikal untuk pemerintah daerah provinsi sebelum otonomi daerah, ketimpangannya semakin tinggi. Setelah dilaksanakannya otonomi daerah, dari tahun ke tahun ketergantungan daerah mengalami penurunan atau menjadi tidak terlalu tergantung terhadap transfer dana pusat. Hal tersebut terjadi karena adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga mempengaruhi sisi penerimaan maupun pengeluaran negara.

Buku ini diakhiri dengan tulisan mengenai pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pengelolaan sektor organisasi publik yang tidak efektif dan efisien telah mendorong reformasi di bidang akuntansi sektor publik. Perkombakan sistem akuntansi ini tidak lepas dari tuntutan akan dilaksanakannya *New Public Management*. Tuntutan masyarakat akan perbaikan pengelolaan organisasi dan keuangan negara pada akhirnya berdampak juga terhadap perubahan pada sistem akuntansi pemerintahan.

Perubahan besar terhadap sistem pengelolaan keuangan negara dimulai dengan diterbitkannya tiga paket undang-undang tentang keuangan negara. Perubahan ini diikuti oleh reformasi sistem akuntansi pemerintahan dengan dikeluarkan Standar akuntansi Pemerintahan pada tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 71 tahun 2010 yang mengharuskan sistem akuntansi pemerintahan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Akuntansi akrual ini sangat populer di sektor swasta sehingga akhirnya diadopsi oleh

akuntansi sektor publik. Meskipun masih menimbulkan pro dan kontra, penerapan sistem ini pada akuntansi sektor publik, sistem ini memberikan banyak manfaat pada pengelolaan keuangan negara.

Diantara beberapa manfaatnya adalah meningkatkan kualitas penggunaan sumber daya, penguatan akuntabilitas, meningkatkan transparansi atas total biaya dari aktivitas pemerintahan serta mampu melihat dengan lebih komprehensif atas pengaruh dari aktivitas pemerintahan terhadap perekonomian. Demikian inti sari buku yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Oktober 2015  
Editor.

Prof. Carunia Mulya Firdausy, Ph.D

## INDEKS

### A

*Accrual Base Accounting*, 125, 136

*Accrual Budgeting*, 127

Adil, 74

Akad, 84, 85, 86, 96

Akuntabel, 127, 133, 136

Akuntabilitas, 50, 119, 120, 122, 123, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138

Akuntabilitas Publik, 132, 135, 136

Akuntansi, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138

Akuntansi Pemerintahan, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 138

Akuntansi Sektor Publik, 121, 123, 124, 127, 130, 135, 136, 137, 138

Anggaran, 60, 62, 72, 107, 109, 122, 128, 129, 130, 133, 134, 136, 138

APBD, 105, 128

APBN, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 97, 105,

*Asset transfer*, 70, 71

### B

Badan Akuntansi Keuangan Negara (Bakun), 129

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 48, 73

Bank Indonesia, 29, 31, 32, 34, 82, 91, 94

Basis Akuntansi, 125, 126, 127

Basis Kas Menuju Akrual, 122, 126

Batas Ambang, 14

Belanja Daerah, 109

Belanja Pegawai, 109

Birokrasi, 104, 123, 132, 137

### C

Cadangan Devisa, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 104

*Cash Towards Accrual*, 130

*Cash Transfer*, 70

*Central Accounting Office*, 129

### D

Daerah, 55, 56, 57, 63, 77, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 122, 123, 125, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136

Daerah Otonom, 102, 105, 111,

DAK, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 29, 33, 38, 41, 48, 49, 50, 54, 57, 61, 62, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 114, 116, 120, 121, 122, 125, 126, 30, 31, 32, 136, 137, 138



- Dalam Negeri, 14, 16, 55, 63, 74, 86, 111, 129
- Dana, 18, 28, 29, 34, 60, 61, 62, 66, 67, 69, 71, 72, 81, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 106, 107, 108, 109, 111, 115, 123, 132
- Dana Investasi Pemerintah, 60, 61
- DAU, 109, 112
- Daya Saing, 15
- Definisi, 114, 123
- Defisit, 34, 104
- Defisit Fiskal, 20, 21, 23
- Defisit Perdagangan, 5
- Demokrasi, 53
- Desentralisasi, 56, 102, 103, 104, 105, 106
- Desentralisasi Fiskal, 106, 130, 135
- Double Entry*, 130
- E**
- Early Warning System*, 1, 2, 6, 7, 73
- Efek Domino, 3
- Efektivitas, 103, 121, 127, 136, 137
- Efisiensi, 29, 107, 121, 125, 127, 132, 134, 136, 137
- Ekonomi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 121, 123, 124, 126, 133, 134, 135, 138
- Ekonomi Makro, 29
- Ekspor, 5, 14, 15, 16, 21, 23, 42, 55
- Engle Granger Causality Test, 38
- Evaluasi, 14, 132
- External Shocks*, 8
- F**
- Faktor, 7, 8, 37, 89, 107, 108
- Finansial, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 30, 66, 68, 73, 86, 87, 132, 135
- Fiskal, 4, 20, 21, 23, 55, 72, 74, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 130, 135
- Fundamental, 5, 74, 88, 138
- G**
- Gap, 29, 103
- Gejolak Finansial, 2
- Gelembung Finansial, 9
- Global, 2, 3, 5, 6, 40, 74, 81, 86, 87, 92, 97, 121
- Good governance*, 74, 120, 121, 131, 137
- H**
- Hukum, 7, 49, 51, 52, 56, 60, 82, 83, 84, 86, 91, 123, 131, 135
- Human capital*, 74
- I**
- Implementasi, 101, 102, 103, 108, 116, 130
- Impor, 15, 23
- Impulse Response Function*, 42
- Indeks, 5, 33, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
- Indeks Komposit, 10
- Indikator, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 72, 73, 93, 106, 108, 112
- Indikator Makroekonomi, 7, 8, 9, 13

- Indonesia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 42, 44, 45, 53, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 77, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 99, 102, 105, 108, 110, 112, 116, 117, 122, 123, 125, 126, 130, 138
- Industri, 30, 31, 35, 36, 40, 48, 58, 66, 67, 69, 70, 74, 80, 81, 82, 87, 90, 91, 92, 94, 97
- Industri Perbankan, 30, 31, 40, 80, 82, 94, 97
- Inflasi, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 104
- Infrastruktur, 48, 49, 60, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 89, 92, 94, 95, 103
- Institusi, 56, 94, 120
- Integral 88, 97
- International Financial Reporting Standards* (IFRS), 125
- Investasi, 14, 15, 23, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 60, 62, 67, 73, 74, 81, 82, 86, 90, 93, 94
- Islam, 82, 83, 84, 87
- J**
- Jasa, 28, 32, 33, 35, 36, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 69, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 124
- Jumlah Uang Beredar, 19, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 43
- K**
- Kabupaten, 102, 107, 109, 111, 115, 116
- Kapasitas, 29, 40, 57, 60, 61, 81, 89,
- Kapasitas Fiskal, 103, 108, 109, 110, 111, 114, 116,
- Kapita, 32, 112, 114
- Kas Basis, 126
- Keadilan, 72, 80, 88, 97, 133, 134
- Kebijakan, 6, 8, 15, 24, 30, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 69, 72, 73, 75, 77, 82, 85, 87, 90, 97, 103, 104, 117, 123, 131, 133, 135
- Kebijakan Ekonomi, 8, 87
- Kementerian BUMN, 52, 56, 57, 58, 59, 70, 73
- Kementerian Keuangan, 52, 64, 73, 111
- Kemiskinan, 4, 89, 104
- Kendala, 81, 89, 92, 103, 136, 138
- Kesinambungan, 72, 138
- Ketimpangan, 4, 114, 115, 116
- Ketimpangan Ekonomi, 4
- Kuangan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 116, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
- Kuangan Daerah, 104, 106, 108, 122, 128, 129
- Kuangan Negara, 52, 56, 61, 62, 64, 106, 119, 120, 122, 124, 126, 129, 130, 131, 133, 134, 138
- Kuangan Pusat, 101, 102, 103, 104, 105
- Kewenangan, 53, 54, 60, 64
- Kinerja, 5, 11, 30, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 62, 63, 71, 73, 81, 88, 89, 112, 121, 126, 131, 132, 136, 137

Kinerja Keuangan, 51, 55, 56, 62  
Kinerja Perekonomian, 11, 47, 48, 51, 55  
*Knowledge networks*, 73  
Konsep, 7, 31, 82, 88, 97, 120, 122, 125, 126, 131, 133, 137  
Konsumsi Pemerintah, 14, 15, 17, 18, 23  
Kredit, 3, 14, 155, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 61, 83, 93  
Kredit Modal Kerja, 28, 36  
Krisis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 40, 80, 86, 88, 97, 103  
Krisis Asia, 2, 3  
Krisis Ekonomi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 86, 103  
Krisis Global, 3, 5, 6, 40  
Krisis Keuangan, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 88, 97  
Krisis Mata Uang, 3, 8, 10, 12, 13

## L

Laba, 49, 50, 52, 56, 57, 58, 63, 64, 72, 74, 75, 106  
Laporan keuangan, 121, 122, 125, 126, 129, 130, 133, 135, 136  
*Leading Indicators* 9  
Lembaga, 8, 28, 29, 34, 43, 49, 61, 74, 82, 83, 84, 86, 88, 96, 99, 121, 123, 125, 128, 137  
Lembaga Intermediasi, 28, 29, 34, 43  
Lembaga Keuangan Internasional (LKI), 61  
Likuiditas, 3, 5, 8, 73, 92, 94, 95  
*Loan to Deposit Ratio*, 29, 94

## M

M2, 15, 19, 20, 23, 33, 38  
Manajemen, 7, 61, 62, 71, 91, 107, 120, 121, 123, 125, 126, 131, 134, 136, 137  
Manajemen Krisis, 7  
Margin, 94, 96  
Masyarakat, 28, 41, 52, 53, 59, 60, 64, 74, 80, 83, 84, 86, 87, 90, 91, 102, 112, 120, 122, 123, 125, 126, 131, 133, 137, 138  
Menengah, 92, 97, 114  
Metode *Machine Learning*, 9  
Modal, 3, 4, 5, 6, 28, 33, 34, 36, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 62, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 83, 86, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 104  
Modal Asing, 6  
Modal Negara, 47, 48, 49, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 72, 75  
Model *Binary Response*, 9, 11, 13  
Model Ekonometri, 9  
Model Konvensional, 9, 11  
Model Logit-Probit, 9  
Model Non Parametrik, 9, 10  
Model *Ordered Probit*, 9, 12  
Model Parametrik, 1, 2, 9, 10, 12, 13, 14  
Moneter, 4, 6, 33, 55, 63, 82, 86, 87, 97, 133  
*Moral Hazard*, 9, 71  
Mudharabah, 83, 84, 85, 88, 93  
Multinomial Logit, 9, 12  
Murabahah, 83, 85, 96  
Musharakah, 83, 88

## N

Nasabah, 20, 29, 34, 81, 93, 94, 96

- Nasional, 6, 28, 44, 47, 48, 52, 53, 60, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 80, 82, 88, 89, 94, 97, 101, 102, 104, 123
- Negara, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 30, 32, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 92, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 114, 17, 19, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138
- Negara berkembang, 11, 12, 30, 120
- Neraca Pembayaran, 5
- New Public Management*, 120, 126, 146
- Nilai Tukar Nominal, 11
- Nilai Tukar Riil, 12, 15, 23
- Nyata, 63, 94, 108, 134
- O**
- Organisasi Sektor Publik, 120, 123, 137, 138
- Otonomi, 103, 108, 109
- Otonomi Daerah, 56, 103, 108, 112, 115, 116, 130, 135
- Otoritas, 89, 90
- P**
- Pajak, 54, 55, 57, 63, 71, 97, 105, 106, 107, 108, 123, 126
- Pangsa, 81, 89, 91, 97
- Pasar Barang, 5, 86, 87
- Pasar Keuangan, 6, 28
- Pasar Modal, 3, 4, 5, 52, 80, 86, 87, 93, 94
- Pasar Tenaga Kerja, 5
- PDB, 4, 14, 15, 17, 18, 23, 32, 36, 37
- Pelaporan Keuangan, 122, 135
- Pelimpahan, 55, 116
- Pemantauan, 92
- Pembangunan, 52, 54, 60, 63, 67, 69, 72, 73, 74, 80, 88, 92, 94, 98, 103, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 117
- Pembangunan Nasional, 52, 62, 72, 74, 88, 94
- Pemberdayaan, 60,
- Pembiayaan, 3, 29, 61, 62, 81, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 108
- Pemerataan, 103, 104, 108, 114
- Pemerintah, 9, 14, 15, 17, 18, 23, 34, 42, 44, 48, 49, 50, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 71, 73, 74, 77, 81, 90, 94, 95, 97, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136, 137, 138
- Pemerintah Daerah, 57, 102, 103, 105, 106, 108, 115, 116, 123, 128, 130, 135, 136
- Pemerintah Pusat, 55, 103, 105, 106, 107, 111, 130
- Pemerintahan, 74, 102, 104, 106, 107, 109, 111, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138
- Pendapatan Asli Daerah, 74, 102, 104, 107, 109, 111, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138
- Pendapatan Daerah, 106, 109
- Pendekatan Signal, 9, 10
- Pendidikan, 73, 111, 112, 123

- Penduduk, 4, 102, 104, 109, 111, 112, 114
- Penerimaan Negara, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 71, 72, 74, 75
- Pengangguran, 4, 5, 87, 89
- Penyertaan Modal Negara (PMN), 48
- Penyimpangan, 137
- Perbankan, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
- Perekonomian, 122, 129, 130
- Perekonomian Indonesia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 128
- Perekonomian Nasional, 6, 44, 28, 47, 48, 52, 53, 60, 71, 72, 101
- Perhitungan Anggaran Negara (PAN), 128
- Perjan, 50, 51, 55
- Persero, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 65, 73, 75, 105
- Perseroan Terbatas, (PT) 56
- Pertumbuhan Ekonomi, 5, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 62, 79, 81, 87, 88, 89, 90, 92, 97, 98, 103, 104, 126, 134
- Perusahaan Umum (Perum), 51
- Physical capital*, 74
- Portofolio, 3, 93, 94
- Potensi, 7, 9, 20, 21, 71, 72, 87, 92, 106
- Prinsip, 28, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 105, 122, 125, 134, 136, 137
- Probabilitas, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 23, 24
- Produk, 5, 15, 55, 84, 85, 90, 93, 95, 96
- Produk Domestik Bruto, 4, 32, 36, 90
- Produktivitas, 36, 74, 88, 97
- Pusat, 27, 31, 32, 34, 47, 55, 77, 89, 84, 90, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 124, 129
- R**
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 53
- RAPBN-P, 48
- Rasio, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 55, 73, 93, 95, 106
- Rebound*, 44
- Reformasi, 103, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 130, 135, 136, 137, 138
- Riil, 12, 14, 15, 23, 29, 63, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 96, 97
- Ritel, 93
- S**
- Saham, 5, 53, 54, 55, 60, 61, 86, 87
- Sektor, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 1225, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138

Sektor ekonomi, 22, 36, 91, 92, 97  
 Sektor Keuangan, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8,  
 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,  
 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 44,  
 45, 46, 50, 51, 62, 70, 75, 86, 87,  
 88, 92, 94, 96, 98, 102, 104  
 Sektor Migas, 15, 16  
 Sentralisasi, 102, 103, 106, 107,  
 108,  
 Share, 36, 75  
 Simpanan, 20, 29, 33, 34, 83  
 Single Entry, 126, 127, 128  
 Sisi Pengeluaran, 71, 126, 137  
 Sistem, 4, 6, 19, 28, 33, 34, 53, 54,  
 73, 80, 81, 87, 88, 92, 95, 97,  
 101, 102, 104, 106, 125, 126,  
 127, 128, 129, 130, 131, 132,  
 133, 134, 136, 137, 138  
 Sistem Akuntansi, 126, 127, 128,  
 129, 131, 136, 137, 138  
 Sistem Akuntansi Instansi, 129  
 Sistem Akuntansi Pusat, 129  
 Sistem Ekonomi, 4, 54, 88, 97  
 Sistem Keuangan, 28, 80, 81, 88, 97,  
 101, 102, 104, 106  
*Stakeholder*, 30, 31, 44, 121, 136  
 Standar Akuntansi Pemerintah, 128  
 Standar Akuntansi Pemerintahan,  
 122, 129, 130, 135, 138  
 Strategis, 53, 67, 70, 71, 80, 90, 92,  
 112  
 Struktur Permodalan, 60, 61  
 Studi Empiris, 4, 9, 13  
*Subprime Mortgage*, 3, 17, 20, 21,  
 22, 80  
 Suku Bunga, 32, 37, 38, 39, 41, 42,  
 43, 86, 96  
 Syariah, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,  
 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,  
 96, 97

## T

Tanggung Jawab, 54, 122, 130, 133  
 Tata Usaha Keuangan, 128  
 Time Series, 13, 30, 33  
 Transaksi, 55, 74, 85, 87, 88, 96, 97,  
 124, 125, 126, 129, 131, 136  
 Transfer, 34, 70, 71, 109, 115, 116  
 Transparansi, 50, 131, 135, 136,  
 138

## U

Uang, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19,  
 20, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 43,  
 61, 71, 72, 86, 87, 96, 105, 108,  
 125, 134  
 Undang-Undang, 7, 51, 53, 59, 82,  
 83, 92, 102, 104, 128, 130, 138  
 Universal, 88, 97  
 Utang Luar Negeri, 17, 18, 19  
 UUD 1945, 52, 71, 133

## V

Variabel Dependen, 9, 11, 32, 39, 40  
 Variabel Independen, 9, 10, 11, 39  
 Variabel Makroekonomi, 8, 14, 15,  
 16, 18, 19, 21, 23, 24  
*Vector Autoregressive Regression*, 31  
*Vector Error Correction Model*, 33

## BIOGRAFI EDITOR



**Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D., APU.** adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR). Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1957. Gelar Sarjana diperoleh dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke jenjang *Master Degree di bidang Agricultural Development Economics (MADE)* dari *Australian National University*, Canberra, Australia pada tahun 1986. Kemudian meraih Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dari *University of Queensland*, St. Lucia, Brisbane-Australia pada tahun 1992. Tahun 1995-1996, menjadi Staf Ahli Khusus Menteri Sekretaris Negara dalam pembuatan materi Pidato Presiden RI bidang Ekonomi. Kemudian tahun 1997-2001 menjadi Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Tahun 2001-2002 menjadi Staf Ahli bidang Ekonomi, Dewan Ketahanan Nasional. Tahun 2005-2010 menjadi Deputy Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) pada Bidang Dinamika Masyarakat dan *President of Non-Align Movement for Science and Technology (NAM)*, serta *Chairman of ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN-COST)*.

Pengabdianannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi mencakup antara lain: (a) penelitian dalam bidang ekonomi pembangunan, makro ekonomi dan ekonomi internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); (b) Konsultan penelitian *Asian Development Bank (ADB)*, *United Nation for Economic and Social for Asia and Pacific (UN-ESCAP)*, *International Labour Organization (ILO)*, UNDP, UNCTAD, UNSFIR, ISEAS, ISIS dan *World Bank*; (c) Dosen dan pembimbing mahasiswa program S1, S2, dan S3, untuk mahasiswa di beberapa Universitas seperti UI, IPB,

UNPAD, dan UNTAR; (d) Mitra Bestari Buletin Ilmiah Perdagangan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Jurnal Standarisasi, BSN; (e) Redaktur Jurnal Ekonomi UNTAR dan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI; (f) sejak tahun 2008 menjadi *Editorial Member of Journal of Social and Economic Science, International Journal of Development Research and Quantitative Techniques* dan *International Journal of Economics and Business Studies*, New York, USA; (g) Editor dari berbagai Jurnal Ekonomi; (h) Penyunting dari berbagai buku dan prosiding bertemakan ekonomi; dan (i) *Coordinator East Asian Development Network (EADN)* untuk Indonesia dan anggota *Think Tank Asian Development Bank (ADB)* sejak tahun 2010. Berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk jurnal telah diterbitkan antara lain dalam *Review of Asian Development Bank (ADB)*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS)*, ILO dan UN ESCAP. Demikian pula dengan buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh UN ESCAP, ILO, UNSFIR, UNDP dan ADB serta penerbit internasional lainnya. Alamat email yang dapat dihubungi adalah [cmfirdausy@gmail.com](mailto:cmfirdausy@gmail.com) dan [carunia\\_firdausy@yahoo.com](mailto:carunia_firdausy@yahoo.com).



## BIOGRAFI PENULIS

**Rasbin**, adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor Jurusan Teknologi Industri Pertanian pada tahun 2005. Gelar Magister Sains Ekonomi diperoleh dari Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia dengan kekhususan Ekonomi Moneter dan Perbankan pada tahun 2008. Penulis pernah terlibat dalam beberapa proyek penelitian di lingkungan Universitas Indonesia sebagai asisten peneliti dan *research fellow* di Direktorat Internasional Bank Indonesia. Penulis juga aktif sebagai asisten dosen di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia juga sebagai dosen tidak tetap di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Saat ini Penulis merupakan peneliti muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Saat ini Penulis juga terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Adapun beberapa tulisan yang pernah dibuat oleh Penulis antara lain: Hubungan Kausal Dinamis Antarvariabel Makroekonomi di Indonesia dalam Kajian Krisis Ekonomi sebagai Kejutan Eksternal, Indikator Kualitas Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan Sektor Industri Dan Penyerapan Tenaga Kerja, Analisis *Shocks* Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Terbuka: Kasus Dua Sektor Ekonomi di Indonesia, Ekspektasi Potensi *Underground Economy* di Indonesia, Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Loans* Sektor-sektor Ekonomi di Indonesia, *Factors Affecting The Community Welfare of Seven Expanded Provinces in Indonesia*, Strategi Antisipasi Efek Krisis Ekonomi terhadap Perekonomian Indonesia, Analisis Pengaruh Kredit Sektoral, Suku Bunga Kredit, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektoral di Indonesia tahun 2005 - 2010: Pendekatan Panel Data, Gejala Deindustrialisasi dan

Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro sebagai Upaya Peningkatan Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Nasional, dan Subsidi dan Upaya Peningkatan Daya Saing Ekspor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: ras9bin@yahoo.co.id.

**Ari Mulianta Ginting** adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 2 Mei 1981. Pendidikan Sarjana Manajemen Keuangan diselesaikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006. Magister Ilmu Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2008 dengan kekhususan Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi Moneter. Bekerja di Sekertariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan konsentrasi kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Ditugaskan sebagai Tim Pendukung Badan Legislasi DPR RI, melakukan pendampingan pembentukan Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, Revisi Undang-Undang Keuangan Negara, harmonisasi RUU Resi Gudang, serta melakukan pendampingan dalam Pansus RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan. Tahun 2012 hingga 2014. Pada tahun 2015, penulis mendampingi dalam RUU Bank Indonesia sampai dengan sekarang. Penulis terlibat Panitia Khusus (Pansus) RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, kemudian pada tahun 2013 terlibat dalam Pansus RUU Revisi Keuangan Negara. Penulis juga terlibat dalam penelitian kelompok Tim Ekonomi dan Kebijakan Publik, dengan berbagai topik diantaranya tahun 2011 Penelitian tentang Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, tahun 2012 Penelitian Tentang Asuransi Umum dan Tahun 2013 tentang Industri Berbasis Input Lokal. Tahun 2014, penulis menjadi bagian dalam kelompok Tim Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan topik mengenai Perkembangan Panas Bumi di Indonesia, dan secara paralel mengikuti Penelitian Lintas Tim Lintas Bidang dengan topik mengenai Evaluasi Kinerja KPK. Dan pada tahun 2015, penulis terlibat dalam tim penelitian Ekonomi

dan Kebijakan Publik dengan topik Dampak Kebijakan Baru Subsidi BBM terhadap Inflasi di Indonesia. Penulis juga bekerja sebagai Dosen Honorer sejak tahun 2008 hingga sekarang untuk mata kuliah Statistika I dan II untuk Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta. Penulis juga bekerja sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Ekonomi di Universitas Pelita Harapan untuk mata kuliah Pengantar Ekonometrika. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail : ari.ginting@dpr.go.id

**Ariesy Tri Mauleny**, adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Palembang, 26 Maret 1975. Penulis menyelesaikan pendidikan S2 pada tahun 2007 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dengan kekhususan Keuangan Pusat dan Daerah. Pendidikan Sarjana S1 Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia diselesaikan pada tahun 1997. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Penulis juga turut mendampingi Pansus RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (2014), RUU Penjaminan (2015), PNPB (2015). Penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal dan Bagian Buku, antara lain: APBN 2016 dan Tantangan Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi; Kemampuan Keuangan Negara dalam Perspektif Pemenuhan Anggaran dan kebijakan Sektor Pendidikan; Pembangunan Perumahan dan Permukiman dalam Perspektif Anggaran dan Kebijakan; Keuangan Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan, Kebijakan MP3EI Sektor Pertambangan: Upaya Memperkuat Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia; dan Urgensi RUU Pengadaan Barang dan Jasa dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui *Good Governance*. Penulis dapat dihubungi melalui email: ariesy.t.leny@gmail.com atau ariesy.t.leny@dpr.go.id.;

**Nidya Waras Sayekti**, lahir di Jakarta 3 Juli 1978, menyelesaikan pendidikan D3 di Politeknik Universitas Indonesia Jurusan Perbankan, S1 di Universitas Mercu Buana Jurusan Manajemen, dan S2 Magister Manajemen di universitas yang sama. Penulis mulai

berkarir sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI sejak tahun 2010 hingga sekarang. Penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Kebijakan Utang Luar Negeri Indonesia Dari lembaga Keuangan Global (2015), RAPBN-P Tahun 2014 Minim Fungsi Stimulus (2014), Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan (2014), Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Provinsi Maluku Utara (2014), dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air: Peran PJTI dalam Menjaga Ketahanan Air dan Pangan di Provinsi Jawa Timur (2013).

**Lisnawati**, adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 8 September 1982. Pendidikan S1 Sarjana Sains diselesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2005. Pendidikan S2 diselesaikan di Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia pada Tahun 2008. Bekerja sebagai Peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Saat ini terlibat aktif dalam penelitian di bidang ekonomi dan kebijakan publik diantaranya penelitian tentang Konektivitas. Penulis dapat dihubungi melalui email: [lisnawati.dpr@gmail.com](mailto:lisnawati.dpr@gmail.com)

**Venti Eka Satya**, menyelesaikan studi S1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomikan dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Bekerja di Sekretarian Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan data dan Informasi (P3DI). Beberapa topik penelitian yang telah dilakukan penulis diantaranya, Peran Diplomasi Indonesia Dalam Mengatasi Kejahatan Transnasional, Pembentukan Kawasan Pariwisata Khusus Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Sektor Pariwisata Nasional, Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan yang terakhir Mengenai Kesiapan Sektor Industry Agro Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Karya tulis ilmiah penulis juga telah dipublikasikan di beberapa jurnal dan dalam bentuk buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: [venti.eka@dpr.go.id](mailto:venti.eka@dpr.go.id).

# PERAN SEKTOR KEUANGAN

TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Buku yang berjudul “Peran Sektor Keuangan Terhadap Perekonomian Indonesia” ini salah satunya ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan yang mendukung perekonomian Indonesia. Di samping itu, buku ini juga mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perkembangan sektor perekonomian masa kini dan dampaknya terhadap perekonomian di masa yang akan datang.

Buku ini terdiri dari enam bab. Bab pertama mengungkap tentang perkembangan *early warning system* keuangan di Indonesia. Dalam bab ini diberikan antara lain tinjauan teori dan empiris mengenai model-model parametrik yang telah ada dalam melihat krisis perekonomian. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dampak pertumbuhan kredit sektor perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi pada bab dua. Bab tiga mendiskusikan kebijakan penyertaan modal negara pada BUMN untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional. Dilanjutkan dengan pembahasan peran perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan sektor riil di bab empat. Dua bab lainnya membahas mengenai sistem keuangan pusat dan daerah dalam memperkuat perekonomian nasional (Bab 5) dan perkembangan perubahan akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Bab 6).



Diterbitkan oleh :  
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika



ISBN 978-602-1247-39-6



9 786021 247396